



**RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2018**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Saudara-saudara warga masyarakat Kabupaten Purworejo yang kami hormati.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT - Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018.

Sesuai amanat Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Adapun tata cara penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disampaikan dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah pada Tahun Anggaran 2018. Selanjutnya melalui media ini kami sampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pembangunan manusia di Kabupaten Purworejo memperlihatkan peningkatan selama kurun waktu 2016-2017. Hal ini ditunjukkan oleh capaian angka IPM selama kurun waktu tersebut, yaitu mencapai 70,66 pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 71,31 pada tahun 2017 dengan status "tinggi". Status tersebut mulai tercapai sejak tahun 2014.

Perekonomian Purworejo cenderung meningkat pada tahun 2017 yang ditandai dengan naiknya pertumbuhan ekonomi dari 5,12 persen menjadi

5,14 persen. Kondisi ini lebih baik dibanding dengan Jawa Tengah yang pertumbuhan ekonominya *stagnan* diangka 5,27 persen baik pada tahun 2016 maupun 2017. Namun keadaan perekonomian Purworejo ini sejalan dengan nasional yang menguat dari 5,03 persen menjadi 5,07 persen di tahun 2017.

Pada tahun 2017, prosentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja sebesar 66,10% sementara tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,64%, terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 4,01% pada tahun 2016. Target capaian tingkat pengangguran terbuka yang harus dicapai pada tahun 2018 adalah 3,8%, dimana angka tersebut telah dilampaui capaiannya pada tahun 2017.

Presentase penduduk miskin di Kabupaten Purworejo pada tahun 2017 adalah 13,91 persen. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan kondisi tahun 2016 dengan presentase penduduk miskin 13,91 persen. Pada Tahun 2018, berdasarkan hasil publikasi data resmi/release dari BPS, presentase penduduk miskin di Kabupaten Purworejo adalah 11,67 persen.

Sedangkan untuk tingkat inflasi Kabupaten Purworejo pada akhir tahun 2018 mencapai 3,10%. Angka inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercatat sebesar 4,29% dan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 2,80%. Secara umum hal ini menunjukkan bahwa gejolak harga yang terjadi selama periode 2018 relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017.

II. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. VISI

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021, VISI Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode Tahun 2016-2021, yaitu: **“TERWUJUDNYA KABUPATEN PURWOREJO YANG SEMAKIN SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN, PARIWISATA, INDUSTRI, DAN PERDAGANGAN YANG BERWAWASAN BUDAYA, LINGKUNGAN, DAN EKONOMI KERAKYATAN“**

B. MISI

Untuk mewujudkan VISI tersebut di atas, MISI-nya adalah:

1. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang religius dan demokratis.
2. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan.
3. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan wisata unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal.
4. Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni, budaya, dan olahraga.
5. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang unggul di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan.
6. Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola

pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.

7. Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang.

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN

Dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan di tingkat nasional maupun propinsi serta dengan memperhatikan pula tujuan pembangunan jangka menengah tahap ketiga yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Purworejo, maka tema pembangunan tahun 2018 adalah : “Melanjutkan Pembangunan Menuju Masyarakat Purworejo yang lebih sejahtera berbasis agribisnis”.

Prioritas pembangunan tahun 2018 adalah :

1. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi
2. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
3. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah
4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
5. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
7. Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana
8. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna
9. Peningkatan kemandirian desa

Arah prioritas pembangunan daerah ini setiap tahunnya telah diselaraskan dengan arah prioritas pembangunan nasional maupun Provinsi Jawa Tengah.

III. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 2018 berpedoman pada Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain mengacu PERDA dimaksud, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Hasil akhir dari proses pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban atas APBD Tahun Anggaran 2018 beserta perubahannya disajikan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, yang disusun setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selesai diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Secara keseluruhan pendapatan daerah dapat tercapai sebesar 99,95% atau Rp 2,049,783,418,674.00 (*Dua triliun empat puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah*) dari target yang dianggarkan sebesar

Rp 2,050,879,036,723.00 (*Dua triliun lima puluh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah*).

Sedangkan belanja daerah dapat tercapai sebesar 94,25% atau Rp 2,125,881,640,293.00 (*Dua triliun seratus dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh satu juta enam empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah*) dari target yang dianggarkan sebesar Rp 1,381,319,390,158.80. (*Satu triliun tiga ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh delapan koma delapan puluh rupiah*).

Berdasarkan perhitungan realisasi anggaran sebagaimana diatas. maka dalam tahun anggaran 2018 terdapat sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan sebesar Rp Rp 107.110.067.657,00 (*Seratus tujuh milyar seratus sepuluh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah*).

Angka tersebut merupakan angka perhitungan SEMENTARA. karena perhitungan yang bersifat FINAL akan dilakukan lebih lanjut pada penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018 setelah dilakukan audit oleh BPK RI.

IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Pendidikan

Penanganan urusan wajib pendidikan telah memberikan beberapa hal positif, indikator aksesabilitas/keterjangkauan terlihat dari ketersediaan layanan pendidikan di Kabupaten Purworejo, antara lain terlihat dari capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) masing-masing jenjang sebagaimana tabel :

No.	INDIKATOR	CAPAIAN		
		2016	2017	2018
1	APK SD/MI/Paket A (%)	102,81	101,54	90,79
2	APK SMP/MTs/Paket B (%)	98,87	98,46	102,19
3	APM SD/MI/Paket A (%)	90,13	90,23	90,79
4	APM SMP/MTs/Paket B (%)	74,85	77,67	96,38

Adanya kenaikan/penurunan APK/APM jenjang pendidikan dasar (setara SD/SMP) lebih disebabkan sudah tercapainya stabilitas capaian keterlayanan pendidikan dasar atas jumlah penduduk usia wajib pendidikan dasar 9 tahun (usia 7 s.d. 15 tahun) dan terjadinya pergeseran usia peserta didik jenjang pendidikan dasar. Dimana pada usia 6 tahun telah memasuki pendidikan setara sekolah dasar dalam

jumlah yang cukup signifikan sementara penghitungan pembagi dari capaian tetap berdasarkan jumlah penduduk usia 7 s/d 15 tahun.

Hasil kegiatan dalam peningkatan kualitas pendidikan antara lain:

- a. Tersalurkannya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat untuk 508 SD dan 43 SMP, serta sekolah inklusi di 10 SDN dan 2 SMPN;
- b. Tersedianya dana pengembangan sekolah untuk 508 SD, 43 SMP, 2 SMPT, 3 sekolah berprestasi, 163 penjaga SD, 322 PTT SMP;
- c. Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru, perpustakaan dan rehabilitasi ruang kelas 43 ruang rehabilitasi, 2 RKB, 4 perpustakaan;
- d. Terlaksananya pemberian peralatan laboratorium komputer SMP Tahun 2018 untuk 10 sekolah;
- e. Terlaksananya pemberian bantuan alat laboratorium IPA Tahun 2018 untuk 5 sekolah;
- f. Terlaksananya rehabilitasi gedung SMP Tahap 3 APBN Tahun 2018 sejumlah 18 ruang;
- g. Terlaksananya pemberian bantuan peralatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) untuk 7 sekolah;
- h. Terlaksananya program renovasi sekolah untuk SMPN 2 Purworejo;
- i. Terselenggaranya ujian sekolah untuk 11.448 siswa SD dan 11.318 siswa SMP.

2. Kesehatan

Upaya-upaya yang dilakukan dalam penanganan urusan kesehatan, disamping meningkatkan kualitas sumber daya manusia, juga meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di RSUD dan puskesmas beserta jaringannya, serta memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

Adapun hasil kegiatan pembangunan bidang kesehatan antara lain :

- a. Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi, penyediaan sarana prasarana, alat kesehatan, operasional dan pelayanan di 27 puskesmas;
- b. Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi, penyediaan sarana prasarana, operasional dan pelayanan di RSUD dr Tjitrowardojo Purworejo;
- c. Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan;
- d. Terlaksananya perbaikan gizi masyarakat;
- e. Terlaksananya jaminan kesehatan daerah (jamkesda) terbayarannya klain non kuota sebanyak 5000 kunjungan;
- f. Terlayaninya maskin yang mendapatkan iuran asuransi kesehatan sebanyak 26.000 orang;
- g. Tersedianya 9 unit instalasi pengolahan air limbah.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Di Kabupaten Purworejo terdapat jalan kabupaten sepanjang 769,25 km. Dari seluruh jalan kabupaten tersebut, pada tahun 2018 yang dalam kondisi baik - sedang 588,15 km (76,46%), rusak 95,50 km (12,41%) dan rusak berat 85,60 km (11,31%). Ditengah keterbatasan anggaran dan tingginya curah hujan yang mengakibatkan kerusakan jalan, berbagai upaya pemeliharaan dan peningkatan jalan telah dilakukan. Antara lain terlaksananya peningkatan Jalan Gebang - Mlaran (5), Jalan Kemanukan - Soko (25), Jalan Jenar - Angkruketip

(39), Jalan Purwodadi - Ngombol (49), Jalan Wunut - Laban (51), Jalan Brenggong - Tlogorejo (59), Jalan Sruwoh - Suren (67), Jalan Kesawen - Kaliglagah (95), Jalan Cempedak - kemranggen (101), Jalan Pakisarum - cempedak (102), Jalan Kalikotes - Kaligintung (104), Jalan Loning - Girijoyo (106), Jalan Bruno - Girijoyo (106), Jalan Bedug - Manisjangan 9107), Jalan Banyuasin - Tridadi (112), Jalan Karangrejo - Ngaran (115), Jalan Ketawang - Laban (120), Jalan Tunjungtejo - Blekatuk (136), Jalan Piono - Cokroyasan (138), Jalan Tridadi - Somowono (175), Jalan Tunggorono - Butuh 968), Jalan Semagung - Durensari (122), Jalan Seren - Pelutan (141), Jalan Diponegoro (233), Jalan Gowong - Watuduwur, Jalan Bruno - Brondong - Kambangan, Jalan jatimalang - Pantai, Jalan Tamansari - Sruwoh 973), Jalan Kemiri - Pituruh (83), Jalan KH Wahid Hasyim serta beberapa kegiatan penggantian jembatan kabupaten yaitu Jembatan Sokopendem, Jembatan Sejambe, Jembatan Bulus, Jembatan Ireng, Jembatan Tlepok dan Jembatan Ngaglik serta kegiatan pembangunan jalan poros desa.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Hasil kegiatan pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman antara lain terlaksananya fasilitasi RTLH, layanan penyelenggaraan rusunawa, pembangunan jalan kelurahan, serta pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Hasil kegiatan antara lain berupa pelaksanaan penegakan produk hukum secara non yustisi dan sosialisasi dan penegakan bidang cukai, patroli dan pengamanan wilayah. Selain itu juga tersedianya 5 lokasi calon tanah relokasi untuk korban terdampak bencana, pengelolaan logistik tanggap darurat bencana alam, penanganan konflik sosial, penyediaan rumah singgah untuk PMKS, serta fasilitasi dan penanganan penyandang disabilitas.

6. Urusan Sosial

Hasil kegiatan di bidang sosial antara lain berupa tersedianya rumah singgah untuk PMKS; terfasilitasinya program keluarga harapan, 25.000 KSM, 100 orang pendamping; terlayannya orang terlantar dan anak terlantar, razia, fasilitasi eks psikotik, layanan PGOT dan penguatan keluarga serta tokoh masyarakat. Selain itu juga terlaksananya verifikasi dan validasi data penerima program penanganan fakir miskin, PMKS dan PSKS di 16 kecamatan.

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Tenaga Kerja

Hasil kegiatan dalam penanganan urusan ketenagakerjaan antara lain terselenggaranya pelatihan keterampilan kejuruan *processing*, garmen *apparel*, otomotif, kejuruan, las, teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu juga terlaksananya *job fair* serta pengembangan dan perlindungan tenaga kerja.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Hasil kegiatan meliputi terlaksananya perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak, fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A), pembinaan dan evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA), pendampingan anak bermasalah, fasilitasi Forum Komunikasi Anak Purworejo (Forkare).

3. Urusan Pangan

Hasil kegiatan antara lain berupa terlaksananya Gerakan Mandiri Pangan, Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), pengembangan sumber pangan alternatif, pengenalan diversifikasi konsumsi pangan lokal, pembinaan dan pengawasan produk pangan segar di 4 pasar, uji residu pestisida sebanyak 45 sampel.

4. Urusan Pertanahan

Hasil kegiatan antara lain terlaksananya fasilitasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk fasilitas umum, serta penanganan sengketa pertanahan.

5. Urusan Lingkungan Hidup

Hasil kegiatan dalam penanganan urusan lingkungan hidup antara lain terlaksananya pemantauan dan pengawasan LH, pengecatan 5 ribu pohon, pengelolaan TPA; tersedianya sarana dan prasarana pertamanan dan kebersihan; terpeliharanya pertamanan dan sarana kebersihan kota; serta tertatanya kawasan Sudagaran Kutoarjo dan alun-alun Kutoarjo.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hasil kegiatan diantaranya terlayannya kartu keluarga (KK) 99.666 pelayanan, KTP-el 101.759 pelayanan, kartu identitas anak (KIA) 12.414 pelayanan; terlaksananya pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan Terpadu; tersedianya peralatan perekaman dan pencetakan KTP-el.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penanganan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa program dan kegiatan, antara lain terfasilitasinya program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG); terlaksananya pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa, terlaksananya Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa, fasilitasi gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta terlaksananya kegiatan Bupati Tilik Desa.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk mendukung keberhasilan program KB, dilaksanakan pelayanan KB sebanyak 1212 orang, operasional 16 balai penyuluh KB, tersedianya sarana prasarana PPKBD; terbinanya Kampung KB 16

desa di 16 kecamatan; dan terlayannya komunikasi informasi edukasi KKB.

9. Urusan Perhubungan

Hasil kegiatan antara lain tersedianya dan terpeliharanya rambu lalu lintas, terpeliharanya lampu penerangan jalan umum sejumlah 4.000 titik, tersedianya alat uji kendaraan bermotor, terlaksananya operasional pengelolaan perparkiran, terpeliharanya terminal, pemeliharaan perlintasan sebidang,

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Hasil kegiatan antara terlaksananya layanan sistem data elektronik berupa langganan dan pemeliharaan jaringan internet dan intranet (client dan servis) 400 mbps dan hosting dan pemeliharaan website, layanan jaringan informasi Pemerintah Daerah (termasuk desa). Selain itu juga terlaksananya integrasi sistem, layanan pihak ketiga (programmer, analys system, ahli jaringan, analis), pengadaan 3 paket sarpras *cyber city*, layanan *hotspot* di area publik dan layanan publik berbasis IT, serta layanan Radio Irama FM.

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain terlaksananya penilaian kesehatan 150 koperasi, terlaksananya temu usaha pelatihan *marketing online* dan promosi UKM sebanyak 48 produk, terlaksananya pengembangan OVOP (*one village one product*). Terlaksananya pendampingan PIRT 120 UMK, serta pelatihan kemasan 240 untuk UMK.

12. Urusan Penanaman Modal

Hasil kegiatan antara lain berupa terlaksananya cetak blangko perizinan 93 jenis, peninjauan lokasi 72 kali, sticker/tanda Izin 2000 lembar, rakor tim pembina perizinan 1 kali, rakor tim teknis perizinan 12 kali, promosi CJIBF, pameran di Jawa Tengah, pameran di luar Jawa Tengah, publikasi Penanaman Modal dan Perizinan; serta tersedianya dokumen peta dan profil investasi.

13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Perhatian terhadap generasi muda antara lain dilakukan dengan dilaksanakannya pembinaan organisasi kepemudaan (KNPI), kegiatan kompetisi olahraga pelajar (POPDA), terselenggaranya kegiatan pembentukan sikap mental dan kedisiplinan siswa, kejuaraan dan invitasi olahraga sebanyak 3 kali seleksi, 7 pengiriman training, 1 invitasi.

14. Urusan Statistik

Hasil kegiatan pada urusan statistik antara lain berupa tersusunnya dokumen statistik sektoral, statistik ekonomi dan statistik sosial; terlaksananya peningkatan kapasitas pengelolaan statistik sektoral kepada 42 OPD.

15. Urusan Persandian

Hasil kegiatan berupa tersusunnya 1 dokumen pengelolaan persandian.

16. Urusan Kebudayaan

Sebagai daerah yang memiliki beragam seni budaya, telah dilakukan upaya penanganan urusan kebudayaan, antara lain terselenggaranya persiapan dan penyelenggaraan pementasan seni budaya dalam daerah dan luar daerah sebanyak 60 kali, festival budaya sebanyak 3 even. Selain itu juga terlaksananya rehab Makam Cokro Negro, pemberian bantuan kepada grup kesenian sebanyak 45 paket; serta tersusunnya kajian hari jadi dan Naskah Akademik.

17. Urusan Perpustakaan

Hasil kegiatan antara lain terlaksananya pelayanan perpustakaan umum menetap dan keliling; pengembangan Perpuseru dan pameran bidang perpustakaan; serta lomba perpustakaan.

18. Urusan Kearsipan

Penanganan urusan kearsipan telah dilakukan melalui berbagai upaya dengan hasil antara lain terlaksananya tertib pengelolaan arsip, rekomendasi hasil monev 42 OPD, 16 UPT dan desa, serta 43 sekolah. Selain itu juga terlaksananya lomba tertib arsip di 43 SMP dan 16 desa, pembinaan 101 petugas pengelola arsip, akusisi arsip; terpeliharanya sarana prasaran kearsipan.

C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. Kelautan dan Perikanan

Dalam upaya meningkatkan produksi ikan, telah dilakukan berbagai kegiatan dengan hasil antara lain terlaksananya pelatihan perbaikan perahu dan perbaikan mesin kepada 30 orang; terlaksananya pengadaan perahu *fiber glass* 18 unit, mesin perahu 18 unit, jaring 18 unit, life jaket 18 unit; terlaksananya pengadaan benih ikan, pakan ikan, kolam terpal 3 kelompok; terlaksananya pelatihan budidaya ikan air tawar kepada 125 orang, monitoring dan evaluasi terhadap 31 kelompok, serta bantuan lele dan nila untuk 31 kelompok.

2. Urusan Pariwisata

Untuk mempromosikan obyek wisata Kabupaten Purworejo, telah dilaksanakan pengembangan potensi obyek daya tarik wisata dan destinasi di 16 kecamatan, operasional pengelolaan 5 lokasi obyek wisata dan aset daerah, famtrip, event WR Soepratman, Festival Jamu, event Lebaran, Festival Layang-layang, Purworejo Carnival, Bruno Jazz dan menyambut Tahun Baru sebanyak 90 kegiatan. Selain itu juga terlaksananya pembangunan lansekap kawasan/plaza gerbang utama, MCK, panggung kesenian, area parkir, air bersih dan kebersihan lingkungan, bangunan kuliner lanjutan; tersusunnya 1 dokumen NA perubahan Perda Restribusi dan Pengelolaan Pariwisata; serta terlaksananya *benchmarking* pengembangan potensi destinasi.

3. Urusan Pertanian

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang pembangunan pertanian antara lain terlaksananya pembangunan 48 jalan usaha

tani sebanyak 48 unit, rehabilitasi 19 jaringan irigasi tersier; pembangunan 30 unit irigasi air tanah fangkal, terlaksananya pelatihan budidaya tanaman hortikultura kepada 910 peserta. Selain itu juga terlaksananya pembinaan ke pelaku utama/ usaha di 494 wilayah (190 penyuluh), pelatihan budidaya ternak kepada 150 orang, penyerahan bibit ternak, pembangunan BPP Loano, rehab rumah pemotongan hewan Kutoarjo dan Purworejo.

4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupa fasilitasi penyelenggaraan energi sumber daya mineral.

5. Urusan Perdagangan

Dalam rangka penyediaan sarana perdagangan yang baik, pengelolaan pasar daerah tetap diupayakan menjadi tempat usaha yang memadai dengan hasil berupa terlaksananya pembangunan pasar rakyat di Purwodadi dan Jenar Wetan, operasional pasar daerah dan instalasi air bersih di 27 pasar daerah, serta penataan PKL. Selain itu juga terlaksananya pengadaan rice milling unit (RMU), truck, bangunan RMU, 1 unit bangunan garasi truck, serta pameran produk unggulan daerah sebanyak 7 kali.

6. Urusan Perindustrian

Dalam menghadapi pasar global, industri di Kabupaten Purworejo diupayakan mampu berkembang dengan baik. Untuk itu telah dilakukan berbagai kegiatan, antara lain berupa terlaksananya pelatihan keterampilan batik untuk 4 KUB (80 IKM), pelatihan biofarmaka kelompok industri kecil untuk 6 KUB (120 IKM). Selain itu juga berfungsinya Gedung Dekranasda untuk *showroom* kerajinan, terfasilitasinya pameran Inacraft di Jakarta, pameran kerajinan di Taman Mini Jaya Ancol Jakarta, pameran kerajinan di Pemalang, pameran kerajinan pada Jumenengan, pameran Hari Keluarga Nasional, pameran Hari Koperasi, Purworejo *Expo*.

7. Urusan Transmigrasi

Hasil kegiatan antara terfasilitasinya penempatan transmigran sebanyak 11 KK terdiri dari 7 KK ke UPT Padang Tarok SP-1 di Kawasan Transmigrasi Muara Takung/Kamang Baru, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sujung Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan 4 KK ke UPT Mahalona SP 1 SKP C Desa Mahalona, Kec. Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.

D. URUSAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN

Hasil kegiatan antara lain terlaksananya:

- a. Terlaksananya kunjungan kerja sebanyak 1435 orang/kali, diklat/workshop sebanyak 165 orang/kali bagi Pimpinan, Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD;
- b. Tersedianya 41 LHP Pra Reviu LKD, 1 LHR LkjIP, 1 LHR LKD, 41 LHR Reviu Renja, 2 LHR RKPD, 2 LHR Reviu KUA PPAS, 82 LHR Reviu RKA, 16 LHE SAKIP, 8 LHE SPIP, 1 Laporan Penerapan ZI, 1

Evaluasi Laporan PMPRB, 1 Laporan Self Ssesment Kapabilitas APIP, 4 Laporan Korsupgah (termasuk aksi PPK), 12 Laporan UPG, 1 laporan Telaah Sejawat, 8 LHE Manajemen Risiko, 1 laporan hasil pendampingan penyusunan Risk Register Manajemen

- c. Terlayannya kepala daerah dan tamu daerah;
- d. Terlayannya jamaah haji daerah (kegiatan operasional pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji sebanyak 730 orang;
- e. Terkelolanya pajak daerah, PBB dan BPHTB;
- f. Tersedianya laporan hasil pengawasan internal secara berkala sebanyak 126 LHP (32 OPD dan 94 desa)
- g. Tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi;
- h. Terlaksananya penerbitan produk hukum daerah berupa 13 Perda, 100 Perbup, 683 SK;
- i. Terlaksananya pengadaan pegawai dan diklat peningkatan kualitas SDM;
- j. Terlaksananya publikasi dan sosialisasi kegiatan daerah melalui media massa dan media luar ruang;
- k. Terlaksananya kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Kecamatan yang dilaksanakan oleh 16 (enam belas) kecamatan;
- l. Terlaksananya kegiatan Penunjang Administrasi Umum yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pemerintah Kabupaten Purworejo pada tahun 2018 menyelenggarakan Belanja Tidak Langsung berupa belanja hibah kepada Pemerintah Pusat dan belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga.

Di sisi lain Pemerintah Kabupaten Purworejo juga menerima Tugas Pembantuan yang dialokasikan pada beberapa Perangkat Daerah antara lain:

- Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan melalui kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Bagi Usaha Mikro;
- Dinas Kesehatan melalui kegiatan: Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit, Pengembangan Pembiayaan Kesehatan di JKN/KIS;
- Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan: Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian, Fasilitasi Pupuk dan Pestisida;
- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melalui kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru, Perpustakaan dan Rehabilitasi Ruang Kelas, Pemberian Program Renovasi Sekolah, serta Pemberian Peralatan Laboratorium Komputer SMP.

VI. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama daerah merupakan wahana dan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, mensterilkan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerjasama daerah juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum, khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal. Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang tata cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah maka daerah harus memiliki inisiatif untuk membaca potensi daerahnya sebagaimana urusan yang telah menjadi kewenangannya untuk dapat dikembangkan melalui kerjasama antar daerah maupun kerjasama dengan pihak ketiga demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kerjasama Antar Daerah dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antara Bupati dengan Gubernur atau antara Bupati dengan Bupati / Walikota daerah lain. Kerjasama Antar Daerah dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama. Kerjasama Antar Daerah yang dilaksanakan harus memenuhi prinsip: efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum.

Kerjasama daerah dengan daerah lain dilaksanakan dalam bentuk *Memorandum of Understanding (MoU)* atau Kesepakatan Bersama. Naskah Kerjasama Kabupaten Purworejo dengan Daerah lainnya yang telah disepakati dan dilaksanakan sampai dengan Tahun Anggaran 2018 adalah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah Nomor 08/MoU.KP/HKM/2017 dan Nomor 019.5/234 tentang Kerja Sama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Maksud dari kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Purworejo adalah guna meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi dan tugas masing-masing sesuai kewenangannya di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan tujuan ditandatanganinya kesepakatan bersama tersebut adalah untuk mewujudkan keserasian dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan antar daerah, memanfaatkan dan memelihara sumber daya daerah secara optimal, mengantisipasi dan memecahkan permasalahan antara daerah secara terpadu dan mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Realisasi dari kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Pihak Ketiga dilaksanakan dalam bentuk kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur dan Perangkat Daerah serta Instansi terkait. Adapun bentuk pelaksanaan kegiatannya antara lain berupa :

- a. Penyusunan Naskah akademik dalam upaya penyusunan produk hukum daerah.
- b. Penerimaan PKL/KKL/KKN dan pengabdian masyarakat lainnya dari mahasiswa universitas yang menjalin kerja sama.
- c. Kerjasama antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo.
- d. Kerjasama dalam upaya pencapaian cakupan kesehatan menyeluruh (*universal health coverage*) bagi masyarakat di Kabupaten Purworejo.
- e. Kerjasama dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara
- f. Pembinaan dan latihan Calon Peserta Seleksi Dalam rangka Penerimaan Calon Anggota Polri

C. Koordinasi dengan Luar Negeri

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dengan luar negeri. Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo telah menandatangani *Letter of Intent (LoI)* antara Pemerintah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah Republik Indonesia dengan Perusahaan Supertext, Swedia tentang Kerjasama dalam Bidang Komunikasi dan Informatika.

Kerjasama ini dilatar belakangi visi yang sama antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Supertext untuk memberdayakan masyarakat di wilayah Purworejo, yaitu dengan membuka akses informasi dengan baik di perkotaan maupun perdesaan meskipun dengan infrastruktur yang terbatas.

Kerja sama tersebut mendukung program prioritas Pemerintah Indonesia (Nawacita) yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa.

Tujuan dari LoI tersebut antara lain :

- a. Memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan *best practice* melalui jalur komunikasi umum;
- b. Menyediakan *platform* komunikasi untuk memberdayakan para petani di wilayah Purworejo untuk mendapatkan akses terhadap informasi mengenai tanaman pangan, cuaca, harga komoditas pertanian dan informasi-informasi lain yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup para petani, menunjang inovasi dengan cara memfasilitasi pertukaran ide-ide diantara para petani dan menyediakan jalur komunikasi digital langsung antara mentor dan para petani.

D. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal

Dalam kurun waktu tahun 2018 dalam upaya mewujudkan harmonisasi penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menyelenggarakan koordinasi Pemerintahan.

Melalui kegiatan Penanganan Konflik Sosial, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo melibatkan instansi-instansi vertikal di wilayah Kabupaten Purworejo untuk merumuskan dan menyampaikan laporan terkait penanganan masalah-masalah sosial yang muncul selama Tahun Anggaran 2018. Melalui kegiatan Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dilakukan monitoring pada tahapan pemilihan sampai dengan pemungutan suara pada tanggal tanggal 27 Juni 2018.

Menanggapi permasalahan mengenai keberadaan penambangan di Kecamatan Bagelen, Unsur Pimpinan Daerah melakukan pengecekan lokasi penambangan liar di Desa Bapangsari dan Krendetan Kecamatan Bagelen untuk mengidentifikasi pelanggaran yang mungkin terjadi. Atas hasil identifikasi, Pemerintah Kabupaten Purworejo menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah sebagai Instansi yang berwenang mengelola ijin pertambangan bersama beberapa Perangkat Daerah terkait untuk menuntaskan permasalahan tersebut.

Persiapan menghadapi Hari Raya Idul Fitri, Hari Natal dan tahun baru serta hari besar lainnya, unsur pimpinan daerah melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga-harga barang kebutuhan pokok bekerjasama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Selain itu, bersama dengan aparat keamanan baik dari unsur TNI dan Kepolisian, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo selalu berusaha menciptakan suasana aman dan nyaman menjelang dan selama perayaan hari-hari besar agama serta menghadapi tahun baru tahun 2019.

Setelah penataan Alun-Alun Purworejo terlaksana, pedagang kaki lima mulai direlokasi ke Romansa Kuliner. Untuk menjaga ketertiban proses relokasi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo bekerjasama dengan instansi vertikal termasuk pada saat menghadapi tuntutan hukum dari pedagang kaki lima yang menolak untuk direlokasi.

E. Pembinaan Batas Wilayah

Pada tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo tengah melakukan proses revisi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo nomor 27 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031. Terkait dengan batas wilayah, salah satu informasi pokok dalam penyusunan Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah adalah batas daerah. Batas administrasi wilayah mendukung proses review Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo. Dalam proses penyusunan didapati adanya perbedaan garis batas antara peta batas administrasi wilayah yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan peta Rupabumi yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Setelah dilakukan pengkajian diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Perbedaan garis batas Peta Rupabumi BIG dengan kondisi empiris disikapi dengan melakukan koordinasi dengan wilayah yang berbatasan (Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta).

Kedua wilayah menyepakati bahwa patok batas yang sudah ada adalah yang sesuai dengan kondisi riil. Kemudian kedua wilayah (Purworejo dan Kulon Progo) masing-masing melakukan konsultasi kepada Pemerinah Daerah Provinsi masing-masing untuk mendapatkan solusi.

2. Pemerintah Daerah Purworejo berkonsultasi pada Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama untuk mendapatkan solusi. Solusi yang ditawarkan adalah melakukan kerjasama antar kedua wilayah yang berbatasan. Solusi tersebut ditanggapi positif oleh Kabupaten Kulon Progo.
3. Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kulon Progo telah menandatangani MoU pada bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Oleh karena itu, tindak lanjut yang diambil adalah kedua wilayah menandatangani surat/nota kesepakatan bersama untuk tetap menggunakan peta Permendagri. Melalui surat kuasa, Sekretaris Daerah masing-masing wilayah menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tersebut.
4. Kesepakatan bersama tersebut digunakan sebagai dasar penggunaan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai acuan penyusunan peta RTRW.

F. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

Pada sepanjang tahun 2018 jika dilihat dari persebarannya, kejadian bencana lebih banyak terjadi di dataran tinggi, wilayah Kecamatan Gebang dengan 102 titik kejadian bencana, Kecamatan Bener dan Kaligesing dengan 66 titik kejadian bencana yang didominasi jenis bencana tanah longsor. Sedangkan wilayah dataran rendah terjadi bencana banjir berada di wilayah Kecamatan Butuh terjadi 10 kali bencana banjir.

Pada tahun 2018 ini Kabupaten Purworejo mengalami bencana kekeringan seperti pada tahun 2015. Oleh Karena itu, BPBD Kabupaten Purworejo menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan dan melakukan droping air bersih di 11 Kecamatan. Terbanyak di Kecamatan Bagelen yaitu 424 tangki, Kecamatan Pituruh 203 tangki dan Kecamatan Bener 116 tangki. Selama periode kekeringan tersebut didistribusikan 1.143 tangki air bersih pada bulan Juli hingga November di 11 kecamatan terdampak.

G. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Kegiatan – kegiatan penanganan ancaman konflik yang menonjol dari tahun 2018, antara lain:

1. Melaksanakan Penegakan Produk Hukum Daerah dengan pembinaan dan operasi Penegakan Perda antara lain penertiban PKL yang masih banyak berjualan ditempat tempat terlarang antara lain di trotoar dan pinggir-pinggir jalan di wilayah Purworejo dan Kutoarjo.

2. Melaksanakan patroli wilayah dinas terkait untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Purworejo.
3. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yakni pengamanan wilayah untuk hari Natal, Tahun Baru, Idul Fitri, Idul Adha, Haji, HUT RI dan HUT Kabupaten. Purworejo
4. Melaksanakan Penegakan Produk Hukum Daerah.

VII. PENUTUP

Pada tahun 2018 lalu, sejumlah prestasi membanggakan berhasil diraih Kabupaten Purworejo, diantaranya memperoleh Piala Adipura setelah penantian panjang selama dua puluh lima tahun. Penghargaan ini berhasil kita raih berkat perjuangan dan kerja keras kita semua, utamanya dalam hal penataan kota seperti revitalisasi Alun-alun dan pembangunan Pasar Baledono.

Dalam hal pengelolaan keuangan, Kabupaten Purworejo juga meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Opini WTP tersebut menjadi pantas diperoleh oleh Kabupaten Purworejo mengingat Kabupaten Purworejo menjadi Kabupaten dengan optimalisasi pendapatan dan manajemen aset daerah terbaik se Jawa Tengah. Opini WTP tentu bukanlah merupakan tujuan akhir, namun diharapkan menambah motivasi untuk semakin disiplin dalam pengelolaan anggaran.

Dalam bidang perencanaan, Kabupaten Purworejo mulai menerapkan *e-Government* pada proses perencanaan dan penganggaran. Pemerintah Kabupaten Purworejo merupakan Kabupaten yang paling baik perencanaan dan penganggarnya di Jawa Tengah.

Selain itu, ada juga penghargaan Manggala Karya Kencana dari Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, karena dinilai mampu menggerakkan program kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga. Purworejo juga meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dan Kabupaten Layak Anak kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penghargaan Kabupaten Peduli Hak Azasi Manusia dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, penghargaan dari BNPB sebagai Kabupaten dengan penanganan bencana alam terbaik tingkat Nasional Wilayah II serta penghargaan terbaru yang diterima pada Bulan Januari 2019 lalu adalah Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award Tahun 2018.

Berbagai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun Anggaran 2018 tidak terlepas dari dukungan dan peran serta berbagai pihak. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Kami menyadari disamping capaian keberhasilan sebagaimana tersebut, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2018, masih terdapat program/kegiatan yang hasilnya belum maksimal, hal tersebut menjadi catatan bagi kami untuk senantiasa mengadakan koreksi/perbaikan pada tahun berikutnya.

Semoga keberhasilan yang telah dicapai dapat menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten

Purworejo. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir bathin kepada kita untuk terus meningkatkan semangat juang membangun Kabupaten Purworejo.

**Sekian dan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Purworejo, 20 Maret 2019

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN, S.E., M.M.